

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DENGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI NON WTP
(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2017)**

Riki Kurnia¹, Fefri Indra Arza²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rikikurnia9191@gmail.com

Abstrack: *The research aims to find out: empirical evidence of financial performance comparisons of District/city governments with unexempted fair opinions (WTP) and non WTP based financial performance ratios in West Sumatera province in 2015-2017. Selection of samples using purposive sampling method. The regional government's financial performance is measured by the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, operating expenditure ratio, capital expenditure ratio and growth ratio compared between local governments that have WTP and non WTP opinions are obtained through the financial statement of the Local government (LKPD) which has been audited by the Financial Audit Board of BPK. Hypothesis testing using different independent T-Test tests. The results of this research proved that there is a difference in financial performance from various financial ratios between the city/District government that obtained WTP and non WTP opinions, with the results thitung $2,207 > T_{table} 2,003$ a significant value of $0,103 > 0,05$. And there are differences in financial performance criteria of efficiency, effectiveness, shopping operations, capital expenditure and growth of PAD between the city/District government that obtained the opinion WTP and non WTP.*

Keywords: *financial performance of local governments, financial statements of the local government (LKPD), Opinion Audit WTP, Non WTP opinion*

How to cite (APA 6th style)

Kurnia, R. & Arza, F.I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), Seri C, 781-794.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan pelayan masyarakat pada sektor publik dengan wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan juga kepentingan negara. Pada dasarnya lembaga

pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjembatani untuk penyediaan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan yang telah ada dalam program pemerintah.

Peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dapat membantu meringkankan beban masyarakat dalam perihal pengurusan layanan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan secara maksimal. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah nantinya kepada masyarakat menjadi tolak ukur dalam penilaian masyarakat terhadap hasil kerja dari pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemda(pemerintah daerah), dijelaskan jika pelaksanaan pemerintah daerah harus sesuai dengan isi dari UUD Republik Indonesia Pada Tahun 1945, pemda (pemerintah daerah), yang melakukan kegiatannya secara mandiri, dituntun agar melakukan percepatan pembangunan nasional di suatu daerah dengan menggali berbagai potensi daerah tersebut.

Dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ada. UU No 32 Tahun 2004 mengenai dana perimbangan diisyaratkan jika setiap daerah berhak untuk melakukan kemandirian daerah dan mengatur sendiri daerah nya. Sehingga ada nya tanggung jawab yang menyeluruh kepada masyarakat.

Dengan mengembangkan potensi daerah serta adanya peningkatan kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di daerah.

PP No 58 tahun 2005 mengenai pelaksanaan keuangan daerah yakni pada ayat 102 alinea pertama menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pemakaian serta pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, dan wajib diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan proses audit laporan keuangan yang telah disusun dan dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan Halim (2001:167) mengatakan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah yaitu dengan (1) keberhasilan keuangan daerah, dengan kata lain pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (2) Tidak adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat atau meminimalisir bantuan dana dari pemerintah pusat ataupun bantuan dari pihak asing. Namun pada kenyataan masih banyak daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat sejak peraturan mengenai otonomi daerah diberlakukan.

Menurut penelitian Jumingan (2006:239) Pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan diantara lain adalah untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempergunakan semua aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara maksimal dan menyeluruh.

Bilamana apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan yang telah dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Tetapi bilamana hasil kinerja melebihi dari apa yang direncanakan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah mempunyai peran yang dominan dalam sistem pemerintahan begitu juga sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan yang

dianggarkan dan direncanakan diawal maka kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah dapat dikatakan buruk atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Akuntabilitas bukan hanya sekedar untuk melihat bagaimana uang atau dana publik tersebut digunakan secara efisien, efektif dan ekonomi. Efisien dapat juga diartikan bahwa penggunaan dari dana publik menghasilkan pemasukan yang maksimal. Efektif dapat juga diartikan anggaran yang ada sesuai dengan pencapaian target-target yang telah direncanakan serta ekonomi yang dapat diartikan sebagai indikator untuk menilai Pengukuran Kinerja Keuangan melalui berbagai macam indikator (Mardiasmo, 2004:182).

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisa perbandingan pelaksanaan (kinerja) keuangan dari pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP (Wajar tanpa pengecualian) dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP (Wajar tanpa pengecualian). Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan mempengaruhi opini audit WTP pemerintah daerah dan Opini Non WTP Pemerintah daerah judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP”.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Kelembagaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga berarti bagian dari beberapa perilaku seseorang, tersusun atas hubungan sosial berstruktur yang saling berkaitan satu sama lain. Penelitian Scott (2008), Kelembagaan tersusun atas beberapa kategori yakni kultural, norma, dan juga peraturan yang harus ditaati.

Menurut penelitian Syahyuti (2011), manusia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan nya serta melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada termasuk regulasi dan norma, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan apa yang sudah ada. Sebagai makhluk sosial manusia harus memahami lagi beberapa peraturan yang dibuat, kemudian memilih sikap dan perilaku nya sendiri. Salah satu nya dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana banyak pemerintah daerah yang masih terlambat dan menunda untuk melakukan penyampaian laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut. Sehingga menimbulkan masalah dalam akuntabilitas pemerintah.

Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

PP No 24 tahun 2005 tentang tata cara pelaksanaan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah atau dapat juga dikatakan standar penyusunan keuangan daerah mendefinisikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kasmir (2008) mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sementara itu Halim (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang

memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pada periode tertentu.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja sebab pengukuran kinerja dilakukan agar pemerintahan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebagai sebuah organisasi sektor publik. Selain itu, pengukuran kinerja dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi semua kebijakan yang ada serta dapat menjadi patokan serta pedoman untuk melakukan berbagai perbaikan di beberapa sektor yang melayani masyarakat.

Manfaat Pengukuran Kinerja

Ada beberapa manfaat pengukuran kinerja pemerintah daerah menurut peneliti diantaranya adalah: 1. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan komunikasi antara berbagai sektor maupun pimpinan serta evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. 2. Dapat dijadikan acuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah apakah terpenuhi dengan baik dan memuaskan.

Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alat pengukuran kinerja merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi (Monika Kussetya Ciptani, 2000). Beberapa pengukuran kinerja keuangan yang dipakai sebagai alat ukur atau indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah:

Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian Halim (2012) menyebutkan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan keadaan dimana suatu daerah mengalami ketergantungan yang sangat besar terhadap beberapa sumber keuangan eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian maka dengan kata lain dapat dijadikan sebagai acuan, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Pengukuran Efektivitas Keuangan Daerah

Setiap daerah mengalami kenaikan maupun penurunan PAD yang menjadi dasar untuk melihat berbagai sumber pendapatan dari masing-masing daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, PAD tidak mencapai dari target yang telah ditentukan. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan pendapatannya. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah (Halim, 2007:234).

Rasio Keserasian Keuangan

Rasio keserasian keuangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi sehingga persentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan juga prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:236).

Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2010:138).

Opini Audit

Tahap akhir dari proses audit adalah dikeluarkannya opini. Opini auditor adalah hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan telah lulus dari salah satu yang material.

Pengertian itu terdapat dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Auditor menyatakan pendapatnya berlandaskan pada audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan yakni: WTP (wajar tanpa pengecualian) Murni dimana laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat telah sesuai dengan standar pelaporan akuntansi pemerintahan.

WTP (wajar tanpa pengecualian) dengan paragraf penjabar dimana laporan keuangan yang ada masih ada beberapa item yang sesuai namun dikecualikan dalam pelaporan. WDP (wajar dengan pengecualian) dimana pemerintah daerah masih ada beberapa item yang tidak sesuai dengan standar yang telah dibuat atau ketidak konsistenan penggunaan metode dalam penyusunan laporan keuangan seperti metode penyusutan yang berubah-ubah setiap tahunnya.

TW (tidak wajar) dimana ada kesalahan yang materialistis atau fatal dalam penyusunan laporan keuangan. Disclaimer (ditolak/tidak memberikan pendapat) dimana laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi ketentuan dari standar yang telah dibuat.

Penelitian Terdahulu

Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013) dalam penelitian berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini penulis akan menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio efisiensi.

Hasil penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.

Kurrohman (2013) dalam penelitian berjudul Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan value for money.

Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013), dalam penelitian berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Seindonesia. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dan menentukan ada atau tidaknya perbedaan dari beberapa rasio keuangan yang digunakan, seperti kinerja keuangan berdasarkan

rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio Efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Hipotesis Kinerja Keuangan Terhadap Opini Audit WTP dan Non WTP

Dengan kata lain output dalam hasil audit merupakan gambaran secara keseluruhan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kementerian/lembaga, maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (Kawedar, 2008).

Khairudin (2013) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang beropini Non WTP. Jika pengelolaan keuangan suatu daerah sudah baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga baik, yang mengindikasikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP lebih baik dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini selain WTP

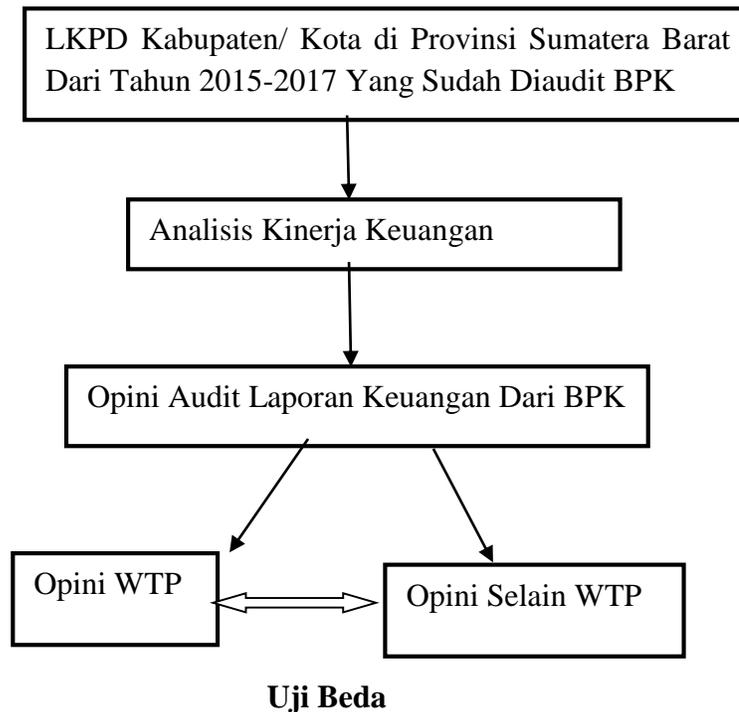
Laporan keuangan pemerintah merupakan bagian yang terpenting untuk keberlangsungan organisasi sektor publik dan juga sebagai bentuk dari penilaian masyarakat terhadap semua pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan digunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk perbandingan (komparatif). Metode kuantitatif merupakan sebuah metode yang digunakan oleh banyak penelitian ilmiah sebagai bagian dari pengujian selain itu pendekatan ilmiah penelitian juga berguna untuk mencari tau sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel penelitian untuk dapat dilakukan ini dilakukan untuk memandangi suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur, jika hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2010).

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sample yang berbeda, atau waktu yang berbeda (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non WTP untuk periode 2015-2017.

Jenis output data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data dokumenter. I Data dokumenter sendiri diperoleh dari beberapa sumber yang berupa LKPD serta LHP yang telah diterbitkan oleh badan pemeriksa keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan objek penelitian merupakan LHP (Laporan hasil pemeriksaan) yang telah di publikasikan di website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau diperoleh dari kantor perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ada di masing-masing provinsi.



Gambar 1.
Kerangka konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Variabel Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Opini Audit Pemerintah Daerah WTP dengan Opini Audit Pemerintah Daerah Non WTP terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015-2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Cabang Padang. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 57 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan berbagai perhitungan Rasio dari Tahun 2015-2017

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah yakni : Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, serta Rasio Pertumbuhan PAD. Rasio kemandirian keuangan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel 1.
Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten /Kota	Tahun 2015	Kemampuan Pendanaan	Pola Hubungan
	Rasio Kemandirian Rumus : Realisasi Penerimaan PAD/Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Pinjaman x 100 %		
Kabupaten Agam	8%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Dharmasraya	8%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Kep. Mentawai	6%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Lima Puluh Kota	6%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Padang Pariaman	7%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Pasaman Barat	8%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Pasaman	10%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Pesisir Selatan	9%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Sijunjung	9%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Solok Selatan	6%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Solok	5%	Rendah Sekali	Instruktif
Kabupaten Tanah Datar	11%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Bukittinggi	13%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Padang Panjang	15%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Padang	24%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Pariaman	6%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Payakumbuh	17%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Sawahlunto	11%	Rendah Sekali	Instruktif
Kota Solok	8%	Rendah Sekali	Instruktif
Provinsi Sumatera Barat	88%	Tinggi	Delegatif
Maximum	88%		
Minimum	5%		
Average	10%		

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat skor Rasio Kemandirian Daerah tertinggi dari 57 sampel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 88,00% pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, dengan kemampuan pendanaan secara delegatif dalam artian sangat mandiri, untuk data pada provinsi sumatera barat merupakan gabungan dari keseluruhan data dari masing-masing kabupaten-kota yang ada di provinsi sumatera barat.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Rumus* yaitu sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ yang\ ditetapkan} \times 100\ %$$

Setelah didapatkan hasil yang ada kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan mengenai Rasio Efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini, dan dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini. Berikut data *Rasio Efektivitas* Pemerintah Daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini dari tahun 2015-2017.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat,\ Provinsi\ dan\ Pinjaman}$$

Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan pengujian rumus statistik, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar

dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang diteliti. Data penelitian yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja Keuangan (Y), sedangkan yang menjadi variabel independen adalah Opini Audit WTP (X1), dan Opini Audit Non WTP (X2)). Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 18.0 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Kemandirian	57	,05	,36	,1114	,05754
Opini Audit	57	,00	1,00	,8070	,39815
Valid N (listwise)	57				

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, Opini audit WTP dan Opini Audit Selain WTP sebagai variabel dependen penelitian memiliki rata-rata sebesar 0,80 dengan standar deviasi 0,39815. Nilai Opini Audit WTP dan Selain WTP yang paling tinggi (maksimum) dan paling rendah (minimum) adalah 1,00 dan 0,00, hal ini dikarenakan untuk Variabel Opini Audit WTP dan Opini Audit Selain WTP, menggunakan perhitungan dengan dummy yakni jika pemerintah daerah memperoleh opini WTP maka akan diberikan kode angka 1, dan jika pemerintah daerah memperoleh opini audit selain WTP maka akan diberi kode angka 0.

Tabel 3.
Uji Model Penelitian

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,078	,017		4,658	,000
	Opini Audit	,041	,019	,285	2,207	,031

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk uji model antara Rasio Kemandirian (Y) dengan Opini Audit X) di dapat bahwa $t_{hitung} 2,207 > t_{tabel} 2,003$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh antara Rasio Kemandirian Daerah yang juga merupakan bagian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan Opini audit, baik pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP maupun pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain dari WTP.

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Unstand ardized Residual	Unstand ardized Residual	Unstand ardized Residual	Unstand ardized Residual	Unstand ardized Residual	Unstand ardized Residual
N		57	57	57	57	57	57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000 0	,000000 0	,000000 0	,000000 0	,000000 0	,000000 0
	Std. Deviation	,055153 07	,112926 54	,051201 37	,061362 44	,059441 51	,021860 61
Most Extreme Differences	Absolute	,161	,065	,087	,071	,094	,176
	Positive	,161	,065	,087	,071	,094	,176
	Negative	-,105	-,048	-,072	-,063	-,077	-,129
Kolmogorov-Smirnov Z		1,218	,493	,654	,533	,708	1,328
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103	,968	,785	,939	,698	,059

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Uji Deskriptif Statistik

Tabel 5.
Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Rasio Kemandirian	57	,1114	,05754	,05	,36
Rasio Efektifitas	57	,9961	,11341	,80	1,26
Rasio Efisiensi	57	,9420	,05143	,80	1,10
Rasio Belanja Operasi	57	,7604	,06159	,65	,90
Rasio Belanja Modal	57	,2357	,05984	,12	,35
Rasio Pertumbuhan PAD	57	,0209	,02197	-,02	,09
Opini Audit	57	,8070	,39815	,00	1,00

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, Rasio kemandirian daerah memiliki rata-rata sebesar 0,1114 dengan standar deviasi sebesar 0,5754, serta memiliki nilai minimum 0,05 dan nilai maksimum 0,36, selain itu untuk Rasio efektifitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9961 dengan standar deviasi 0,1134 serta memiliki nilai minimum sebesar 0,80 dan nilai maksimum sebesar 1,26.

Selanjutnya Rasio efisiensi, berdasarkan data yang telah diolah dapat dilihat bahwa Rasio efisiensi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9420 dengan standar deviasi sebesar 0,5143, serta memiliki nilai minimum di pada posisi 0,80 dan nilai maksimum sebesar 1,10. Kemudian untuk Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal memiliki rata-rata 0,7604 dan juga 0,2357, dengan standar deviasi dari masing-masing variabel sebesar 0,06159 untuk Rasio Belanja Operasi dan 0,5984 untuk rasio belanja modal, serta memiliki nilai minimum sebesar 0,65 untuk Rasio Belanja Operasi dan nilai maksimum sebesar 0,90 untuk Rasio Belanja Operasi. Disisi lain Rasio Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 0,12 dengan nilai maksimum sebesar 0,35.

Selanjutnya pada Rasio Pertumbuhan PAD, memiliki rata-rata sebesar 0,0209 dengan standar deviasi sebesar 0,02197 dengan nilai minimum sebesar -0,2 dengan nilai maksimum sebesar 0,09.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Apabila $\text{sig} > 0,05$ pada uji ini, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,932	,016		59,843	,000
	Opini Audit	,012	,017	,094	,702	,486

a. Dependent Variable: Rasio Efisiensi

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan variabel menunjukkan level $\text{sig} > 0,05$ yaitu 0.486 untuk Opini Audit terhadap Rasio Efisiensi Jadi, dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan pengolahan data statistik di atas, maka diperoleh data bahwa Rasio kemandirian mempunyai nilai $\text{sig} > 0,05$, maka dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan antara masing-masing variabel yakni Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Belanja Operasi, Rasio Efisiensi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan PAD.

Uji Hipotesis Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Opini Audit WTP dan Selain WTP (X1) terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai $t_{hitung} 2,207 > t_{tabel} 2,003$ t_{hitung} nilai $\text{sig} 0,103 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel Opini Audit berpengaruh signifikan, serta memiliki arah positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP lebih baik dari kinerja pemerintah daerah dengan opini selain WTP, maka dapat dikatakan **Hipotesis Diterima**.

Tabel 7.
Analisis Independent T-test

		t-test for Equality of Means		
		t	df	Sig. (2-tailed)
Rasio Kemandirian	Equal variances assumed	2,207	55	,031
	Equal variances not assumed	3,230	30,884	,003
Rasio Efektifitas	Equal variances assumed	-,688	55	,494
	Equal variances not assumed	-,538	12,209	,600
Rasio Belanja Operasi	Equal variances assumed	,640	55	,525
	Equal variances not assumed	,642	15,199	,531
Rasio Efisiensi	Equal variances assumed	,702	55	,486
	Equal variances not assumed	,925	23,809	,364
Rasio Belanja Modal	Equal variances assumed	-,862	55	,392
	Equal variances not assumed	-,838	14,696	,415
Rasio Pertumbuhan PAD	Equal variances assumed	,759	55	,451
	Equal variances not assumed	,920	20,077	,369

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2019

PEMBAHASAN

Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dimana jika opini audit yang diperoleh oleh pemerintah daerah baik maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa opini audit menjadi salah satu dasar dalam menilai kemampuan kinerja keuangan suatu daerah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2013) dimana Opini audit kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang beropini Non WTP. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013) , yang menyatakan bahwa Opini Audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Opini audit mempunyai peran yang penting dalam proses kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi terhadap semua kebijakan yang telah dilakukan.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah WTP dengan Pemerintah Daerah dengan Opini Audit Selain WTP.

Berdasarkan hasil uji independent t-test bahwa tidak ada perbedaan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP. Dengan kata lain pemerintah daerah menggunakan rasio yang sama terhadap perhitungan kinerja keuangan sehingga tidak ada perbedaan kinerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Non WTP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini menunjukkan opini yang didapatkan pemerintah daerah kabupaten/ kota menunjukkan perbedaan yang signifikan kinerja yang berkaitan dengan tingkat ekonomis kinerja keuangan.
2. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi antara pemerintah daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah daerah dapat menjamin kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi baik.
3. Tidak terdapat perbedaan perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah baik yang memperoleh Opini WTP dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Selain WTP.
4. Terdapat hubungan yang signifikan dari Rasio Pertumbuhan PAD terhadap opini audit pemerintah daerah, dimana Rasio Pertumbuhan PAD menjadi bagian terpenting dalam memperoleh Opini Audit.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan terkait penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2017, tidak melibatkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan kondisi pemerintah daerah secara menyeluruh di Indonesia.
2. Perbandingan kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya uji beda antara kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP dan non WTP, sehingga kurang memberikan keadaan kinerja pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP, TW, dan TMP. Agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan kinerja keuangan dengan opini tersebut.
3. Penggunaan indikator kinerja hanya terbatas pada penggunaan Enam jenis rasio keuangan, yaitu kemandirian daerah, Rasio efisiensi, dan efektivitas, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan PAD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi Pemerintah daerah kabupaten/ kota agar lebih baik dalam melakukan penganggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan diharapkan dengan opini yang baik akan mencerminkan kinerja keuangan yang baik juga, selain itu pemerintah daerah dengan Opini Non WTP tidak selamanya buruk dalam pengelolaan keuangan.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas indikator kinerja yang digunakan agar penelitian dapat lebih baik. Serta menambah sampel yang lebih banyak lagi, agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini dari BPK secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. (2014). Mukomuko Dalam Angka Tahun 2014. Katalog BPS 1102001,1706
- Dwiranda, G. (2008). Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten / Kota Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Ilmiah*.
- Gustari, A. (2014). Evaluasi Kinerja Keuangan Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Universitas Bengkulu.
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hony, A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Blora (Studi Kasus DPPKAD Kab. Blora Tahun 2007-2011).
- Ihyaual. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Muhibtari, N. A. (2015). Analisa Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 2008-2012.
- Nurhidayat. (2005). *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peraturan Pemerintah. (2005). Permen Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan.
- Puspita, F. A. (2012) Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Malang Tahun 2007-2011. *Jurnal Financial Performance*.
- Puspita, R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. *Tesis*. Universitas Bengkulu.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Tyas, N. (2012). Analisis Keuangan APBD Kab. Sleman 2010. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Akuntansi Indonesia*, 1(1).
- Zhufinsa, A. N. R. (2011). Analisa Rasio Keuangan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2006-2010. *Skripsi*. Institut Manajemen Telkom Bandung.